

IMPLIKATUR KAMPANYE POLITIK DALAM KAIN RENTANG DI RUANG PUBLIK

THE IMPLICATURE OF POLITICAL CAMPAIGN IN THE BANNER OF PUBLIC SPACES

Suryo Handono

Balai Bahasa Jawa Tengah

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Telepon (024)76744357, Faksimile (024) 76744358

Pos-el: shandono78@gmail.com

Naskah diterima: 15 Maret 2017; direvisi: 21 Mei 2017; disetujui: 18 Desember 2017

Abstrak

Kampanye politik merupakan komunikasi yang terencana untuk membentuk suatu citra yang diharapkan oleh penutur. Dalam tuturan komunikasi itu terdapat maksud yang tersurat dan tersirat atau disebut implikatur. Masalah penelitian ini adalah implikatur dan sumber implikatur apa saja yang muncul dalam kampanye politik pada kain rentang di ruang publik. Penyediaan data dilakukan menggunakan metode simak dengan teknik catat dan rekam. Data penelitian dianalisis melalui analisis pragmatik dengan metode padan terungkap bahwa dalam kampanye politik terdapat implikatur konvensional dan konversasional. Teori pragmatik digunakan untuk membedah implikatur kampanye politik. Hasil dan pembahasan penelitian ini membuktikan bahwa implikatur konversasional yang timbul adalah meyakinkan, mengajak, meminta, menjanjikan dan memerintah. Implikatur tersebut bersumber pada penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Penerapan prinsip kerja sama, meliputi pemenuhan dan pelanggaran maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Kemudian, penerapan prinsip kesantunan, meliputi pemenuhan maksim ketimbangraasaan.

Kata kunci: implikatur, kampanye politik, kain rentang

Abstract

Political campaigns are planned communications to form an image that speakers expect. In the speech of the communication there is an explicit and implied meaning or called implicature. This problem of this research is the implicatures that appeared in political campaign implicatures in the banner in the public area. Provision of data is done by using the method of simak with note and record technique. Data is analyzed through pragmatic analysis with the padan method it's revealed that in the political campaign there are conventional and conversational implicature. Pragmatic theory is used to dissect political implicatures. The results and discussion of this research prove that the conformational implicatures that arise are convincing, inviting, asking, promising and governing. The implication is derived from the application of the principle of cooperation and the principle of politeness. Implementation of the principle of cooperation includes the fulfillment and violation of the maxim of quantity, quality, relevance, and manner. Then, the application of the principle of politeness, including the fulfillment of maximal rather than the contraceptive as well as the maximal offense of misuse, generosity, and humility.

Keywords: implicature, political campaign, range fabric

PENDAHULUAN

Kampanye politik merupakan sebuah komunikasi untuk membuat citra partai dan calon anggota legislatif sebagai pilihan yang paling tepat. Pada komunikasi itu penutur menggunakan bahasa untuk mengemas gagasan, perasaan, ide, dan maksud dalam suatu wacana. Wacana itu menjadikan mitra tutur memahami maksud penutur dan memunculkan suatu reaksi, respon, maupun tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan harapan penutur.

Setiap tuturan pada kampanye politik memiliki maksud tertentu yang mungkin tidak dipahami secara langsung oleh mitra tutur karena adanya konteks yang mengikat tuturan. Untuk itu, dibutuhkan kajian yang mampu menelaah maksud-maksud implisit dalam tuturan. Salah satu kajian itu adalah pragmatik. Pragmatik mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan digunakan dalam komunikasi (Wijana dan Rochmadi, 2009, hlm. 4). Selain itu, pragmatik mengkaji makna yang dikodekan dengan konteks penggunaan bahasa (Cruse, 2000, hlm. 16).

Penggunaan bahasa dalam kampanye politik dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Salah satu tuturan yang dituliskan adalah tuturan para calon anggota legislatif pada kain rentang. Isi kampanye politik dalam kain rentang sangat menarik untuk diamati karena aktivitas tersebut memperlihatkan bentuk bahasa yang dimanfaatkan sedemikian rupa untuk tujuan mempengaruhi atau memersuasi pembaca. Tujuan itu ditempuh dengan berbagai cara, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kampanye positif dilakukan dengan “menjual” keunggulan-keunggulan, sedangkan kampanye negatif ditempuh untuk menyerang lawan politik dengan membeberkan kejelekan-kejelekannya.

Sebagai bentuk penggunaan bahasa, kampanye politik selalu terikat dengan konteks

dan situasi yang melingkupinya. Penggunaan bahasa tidak pernah lepas dari fungsi dan tujuan dalam komunikasi. Setiap tuturan dalam kain rentang tersebut memiliki maksud dan tujuan yang mungkin tidak eksplisit.

Tuturan calon anggota legislatif dalam kain rentang menarik untuk dikaji karena merupakan tindak praktik sosio-budaya yang tidak hanya memiliki makna literal, tetapi juga makna nonliteral, atau yang disebut oleh Grice (1957, hlm. 385) sebagai makna alami dan makna tidak alami. Makna literal atau alami sesuai dengan makna kata-kata dalam tuturan, sedangkan makna nonliteral atau tidak alami merupakan makna yang tersirat dalam tuturan. Sebagai contoh tuturan *Mohon doa restu*. Tuturan tersebut memiliki makna literal jika tuturan itu dimaksudkan sebagai ekspresi penutur yang meminta doa dan restu pada mitra tutur. Karena tuturan itu berlatar dan bertujuan tertentu, informasi yang dikatakan cenderung berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Tuturan tersebut cenderung memiliki alternasi maksud meminta dukungan kepada mitra tutur untuk memilihnya dalam pemilihan umum. Adanya makna nonliteral di samping makna literal itu mengakibatkan “apa yang dikatakan” dan “apa yang dimaksudkan” cenderung berbeda. Keadaan seperti itu lazim disebut implikatur percakapan (Grice, 1975, hlm. 43).

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah implikatur apa saja yang muncul dan apa saja sumber implikatur kampanye politik dalam kain rentang di ruang publik. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menjawab masalah tersebut dengan menyediakan data (Sugiyono, 2014, hlm. 31). Jawaban tersebut diwujudkan dalam deskripsi implikatur dan sumber yang memunculkannya. Deskripsi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi tentang implikatur dan sumbernya serta memberikan aplikasi teori pragmatik.

Implikatur kampanye politik sudah pernah

diteliti oleh Sulistyaningtyas (2009) dan Zakiyah (2015). Sulistyaningtyas dengan judul “Bahasa Indonesia dalam Wacana Propaganda Politik Kampanye Pemilu 2009 Satu Kajian Sosiopragmatik” mengungkap fungsi bahasa dalam politik, variasi bahasa dalam kampanye, dan tindak tutur pengungkap implikatur. Kemudian, Zakiyah dengan judul “Implikatur dalam Wacana Kampanye Politik Pilkada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014—2019” mengungkap tindak tutur dan implikatur yang dominan dalam kampanye politik. Kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada tindak tutur pengungkap implikatur. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini mengkhususkan pada kain rentang untuk mengungkap jenis dan sumber implikatur kampanye politik.

Implikatur adalah implikasi pragmatik dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan (Nadar, 2013, hlm. 60). Implikatur percakapan merupakan proposisi atau pernyataan implikatif, yaitu apa yang mungkin diartikan, disiratkan, atau dimaksudkan oleh penutur, yang berbeda dengan yang dikatakan oleh penutur dalam suatu percakapan (Grice, 1975, hlm. 43; Gazdar, 1979, hlm. 38). Implikatur percakapan terjadi karena sebuah ujaran memunyai implikasi berupa proposisi yang sebenarnya bukan bagian dari tuturan itu (Rustono, 1999, hlm. 82).

Gunarwan (2007, hlm. 247) mengungkap bahwa implikatur sangat diperlukan dalam tuturan karena menghubungkan antara ekspresi, makna, makna penutur, dan implikasi suatu tuturan. Sementara itu, Grice (1975, hlm. 45) mengemukakan bahwa ada dua jenis implikatur, yaitu konvensional dan konversasional. Implikatur konvensional mengandung implikasi langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan, sedangkan implikatur konversasional adalah tindak ilokusi yang

implikasi pragmatiknya diambil dari prinsip-prinsip percakapan (Handono, 2013, hlm. 28). Dengan kata lain, implikatur konversasional adalah maksud yang tersirat dan berbeda dengan yang tersurat (Rohmadi, 2004, hlm. 55). Implikatur konversasional inilah yang disebut implikatur.

Lyons (1995, hlm. 272) menjelaskan bahwa bentuk implikatur konvensional dan konversasional bergantung pada kondisi kebenaran dalam penggunaan konvensi, makna, bentuk-bentuk tertentu, dan ekspresi. Keduanya berasal dari seperangkat prinsip yang mengatur perilaku percakapan. Implikatur konvensional diperoleh dari makna kata, bukan dari pelanggaran prinsip percakapan, sedangkan implikatur konversasional diperoleh dari fungsi pragmatis yang tersirat dalam percakapan. Implikatur konvensional dikaitkan dengan penggunaan dan pemaknaan umum, sedangkan implikatur konversasional merujuk pada prinsip-prinsip pertuturan secara tepat. Implikatur konversasional muncul dalam suatu tindak percakapan secara temporer (terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan) dan non-konvensional (sesuatu yang diimplikasikan tidak berhubungan langsung dengan tuturan) (Levinson, 1991, hlm. 117).

Ada seperangkat asumsi yang mengatur percakapan, yaitu prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Dalam melaksanakan prinsip kerja sama, penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (*maxim of conversation*), yaitu: kuantitas (*maxims of quantity*), kualitas (*maxims of quality*), relevansi (*maxims of relevance*), dan cara (*maxims of manner*) (Grice, 1975, hlm. 45—47). Maksim kuantitas mewajibkan penutur memberikan kontribusi berupa informasi yang diperlukan untuk tujuan percakapan yang ada dan melarang penutur memberikan kontribusi melebihi informasi yang diperlukan. Maksim kualitas mewajibkan penutur memberikan kontribusi yang benar

dengan tidak mengatakan sesuatu yang diyakini salah dan buktinya tidak memadai. Maksim relevansi menuntut penutur memberikan kontribusi yang relevan. Kemudian, maksim cara menuntut penutur untuk menghindari ketidakjelasan, ketaksaan, dan berbelit-belit serta bersikap teratur (Cumming, 2007, hlm. 15).

Dalam melaksanakan prinsip kesantunan, penutur harus memenuhi enam maksim, yaitu ketimbangrasaan (*tact maxim*), kemurahhatian (*gene-rosity maxim*), keperkenanan (*ap-pobation maxim*), kerendahhatian (*modesty maxim*), kesetujuan (*agree-ment maxim*), dan kesimpatian (*sympathy maxim*) (Leech, 1983, hlm. 132). Maksim ketimbangrasaan menyarankan agar meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain. Maksim kemurahhatian menyarankan untuk meminimalkan keuntungan kepada diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan kepada pihak lain. Maksim keperkenanan menyarankan untuk meminimalkan penjelekan dan memaksimalkan pujian kepada pihak lain. Maksim kerendahhatian menyarankan agar meminimalkan pujian dan memaksimalkan penjelekan kepada diri sendiri. Maksim kesetujuan menyarankan kepada penutur untuk meminimalkan ketidak-setujuan dan memaksimalkan kesetujuan antara diri sendiri dan pihak lain. Kemudian, maksim kesimpatian menyarankan agar me-minimalkan antipati dan memaksimalkan simpati antara dirinya dan pihak lain (Rustono, 1999, hlm. 89—96).

Prinsip kerja sama yang terjabar dalam empat maksim bersifat mengatur (*regulative*). Secara normatif setiap percakapan harus mematumhinya. Prinsip kerja sama itu dirumuskan oleh Nababan (1987, hlm. 31) sebagai “Buatlah sumbangan percakapan Anda sedemikian rupa sebagaimana diharapkan, pada tingkat percakapan yang bersangkutan, oleh tujuan percakapan yang diketahui atau oleh arah percakapan yang sedang Anda ikuti”.

Prinsip tersebut tidak selamanya dipatuhi. Dalam suatu percakapan banyak ditemukan “pelanggaran” terhadap prinsip kerja sama tersebut. Pelanggaran terhadap prinsip itu tidak berarti “kerusakan” atau “kegagalan” dalam percakapan. Pelanggaran itu dilakukan penutur untuk memperoleh efek implikatur dalam tuturan yang diucapkannya, misalnya untuk berbohong, melucu, atau bergurau.

Prinsip kesantunan berkaitan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetika, dan moral dalam bertindak tutur (Grice, 1975, hlm. 308). Ketika menyampaikan informasi, maksud atau tujuan, amanat, dan tugas, penutur harus menjaga dan memelihara hubungan antara dirinya dan mitra tutur.

METODE

Metode merupakan upaya strategis untuk memecahkan masalah yang meliputi penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data (Sudaryanto, 2015, hlm. 6). Data penelitian ini adalah tuturan kampanye politik Pemilu Legislatif 2014 di Jawa Tengah yang dituangkan pada kain rentang. Penyediaan data tersebut dilakukan dengan metode simak dengan didukung teknik rekam dan catat. Metode simak ini dapat disejajarkan dengan metode pengamatan atau observasi dalam ilmu sosial dan ilmu lain (Sudaryanto, 2015, hlm. 203).

Data yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis melalui pendekatan pragmatik dengan menggunakan metode padan, yaitu metode yang alat penentunya berada di luar dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 2015, hlm.15). Selanjutnya, hasil analisis itu disajikan dengan metode informal, yaitu perumusan dengan kata-kata biasa (Sudaryanto, 2015, hlm. 241).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dipaparkan implikatur kampanye politik dalam kain rentang. Kemudian, dipaparkan pula sumber implikatur

yang meliputi penerapan dan pelanggaran prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan. Dengan mengungkap sumber implikatur akan terungkap pula bentuk implikatur yang muncul pada setiap tuturan kampanye politik.

Implikatur Kampanye Politik dalam Kain Rentang

Pada kampanye politik terdapat implikatur konvensional dan konversasional. Implikatur konvensional merupakan pengertian yang bersifat umum. Hal itu berarti bahwa implikasi itu sudah diketahui dan dipahami semua orang. Pemahaman terhadap implikasi konvensional mengandaikan mitra tutur memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sama dengan penutur, seperti contoh berikut ini.

Data 1

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
 Mohon doa restu
 Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat
 KARTU SUARA DPRD KOTA TEGAL
 4 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
 PERJUANGAN
 3 ENDANG WIDYANINGRUM (BU EKO)
 Caleg DPRD Kota Tegal Dapil IV
 (Kecamatan Tegal Timur)

Pada data 1 terdapat unsur yang menyatakan makna konvensi yang memiliki implikasi tuturan, yaitu orang yang menyatakan tuturan itu adalah seorang yang patuh dan taat beragama. Hal itu tampak pada tuturan yang mendasari tuturan berikutnya, yakni *Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang*. Melalui tuturan ini diketahui bahwa penutur adalah orang yang selalu melangkah dalam rida Allah. Selain itu, tuturan tersebut juga memiliki konvensi bahwa penutur adalah orang yang dengan rendah hati meminta dukungan agar dapat berjuang untuk menyejahterakan rakyat, *Mohon*

doa restu, Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat. Meskipun makna konvensi seperti itu masih dapat diperdebatkan, pembaca diharapkan dapat memahami dan memaklumi sifat konvensionalitasnya. Contoh implikatur konvensional lainnya terdapat pada data 2 berikut ini.

Data 2

Bersama Rakyat Kita Menang
 DAFTAR CALON LEGISLATIF PARTAI
 DEMOKRAT
 DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
 PERIODE 2014—2019
 DAPIL III
 7. PARTAI DEMOKRAT
 2. IR. YENI SUDIYONO
 CALEG DPRD PROV. JATENG
 (REMBANG, PATI, BLORA,
 GROBOGAN)

Seperti halnya data 1, pada data 2 juga terdapat unsur makna konvensi yang memiliki implikasi tuturan, yaitu hanya dengan dukungan rakyat partai penutur dapat menang. Selain itu, tuturan itu juga memiliki implikasi meminta dukungan rakyat agar menang. Implikatur konvensional tersebut bersifat non-temporer. Hal itu berarti bahwa makna itu lebih tahan lama. Suatu leksem tertentu, yang terdapat dalam suatu bentuk ujaran, dapat dikenali implikasinya karena maknanya yang “lama” dan sudah diketahui secara umum.

Implikatur konversasional atau percakapan terjadi saat berlangsungnya tindak percakapan dan implikasinya tidak berhubungan langsung dengan tuturan. Implikatur tersebut terdapat pada contoh berikut ini.

Data 3

HJ. NOOR HANI'AH, SH
 CALEG DPRD PROP. JATENG DAPIL II
 (KUDUS, JEPARA, DEMAK)
 3 PDI PERJUANGAN
 SURAT SUARA PEMILU CALEG DPRD
 PROP. JATENG DAPIL II (Kudus, Jepara,

Demak)
3. HJ. NOOR HANI'AH, SH
Mantan Wakil Bupati Kudus
Terus Berjuang untuk Kesejahteraan
Rakyat

Data 4

MELANJUTKAN AMANAH
DPR RI DAPIL JATENG II 2014
5 PARTAI GOLKAR
2 NUSRON WAHID
Calon Anggota DPR RI Dapil Jateng II
Kudus-Demak-Jepara
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT GP
ANSOR

Tuturan pada data 3, *Hj. Noor Hani. ah, S.H.*; *mantan Wakil Bupati Kudus; terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat*, memunculkan beberapa implikatur sebagai berikut.

- (3a) Hj. Noor Hani'ah, S.H. dulu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus.
- (3b) Ketika menjabat sebagai Wakil Bupati Kudus, Hj. Noor Hani'ah, S.H. selalu berjuang untuk kesejahteraan rakyat.
- (3c) Kini Hj. Noor Hani'ah, S.H. mencalonkan menjadi anggota legislatif DPRD Jateng melalui PDI Perjuangan.
- (3d) Jika terpilih, Hj. Noor Hani'ah, S.H. berjanji akan terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Seperti halnya tuturan data 3, tuturan pada data 4 memuat tuturan yang memunculkan implikatur percakapan sebagai berikut.

- (4a) Nusron Wahid pernah mendapat amanah menjadi anggota legislatif.
- (4b) Kini Nusron Wahid mencalonkan diri kembali menjadi anggota legislatif RI.

Sumber Implikatur Kampanye Politik

Implikatur kampanye politik bersumber pada penerapan dan pelanggaran prinsip kerja sama serta penerapan dan pelanggaran prinsip

kesantunan. Sumber implikatur tersebut akan diperikan satu persatu sebagai berikut.

Penerapan Prinsip Kerja Sama

Penerapan prinsip kerja sama sangat membantu mitra tutur dalam memahami sebuah ujaran dan dapat menghindari kesalahpahaman. Prinsip kerja sama juga diterapkan dalam kampanye politik. Penutur berusaha menerapkan prinsip kerja sama agar maksud yang ingin disampaikan dapat diterima. Penerapan prinsip kerja sama itu dilakukan dengan pemenuhan maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara.

Pemenuhan maksim kuantitas berkaitan dengan jumlah kontribusi terhadap koherensi percakapan. Maksim kuantitas ini mewajibkan peserta tutur untuk memberikan kontribusi yang memadai dalam sebuah percakapan. Kontribusi setiap peserta tutur hendaknya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pemenuhan maksim kuantitas dalam kampanye politik pada kain rentang terdapat pada tuturan berikut ini.

Data 5

5 PARTAI GOLKAR
LIK DJO ASLI WONG SUMBER
'Lik Djo asli orang Sumber'
5 RAHARDJO, SH
CALON ANGGOTA DPRD DAPIL
KOTA SURAKARTA 2
KRITIS, TEGAS & MEMBELA WONG
CILIK

Data 6

Yang Salah Tetap Salah Yang Benar Tetap Benar di Mata Hukum
ITULAH INDONESIA HEBAT
4. PDI PERJUANGAN
INDONESIA HEBAT!
4. TJAHO KUMOLO, SH
Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah
(Semarang, Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang)

Pada data 5 dan 6 penutur memenuhi

maksim kuantitas dalam penerapan prinsip kerja sama. Penutur memberikan kontribusi yang memadai dan tidak berlewat sesuai dengan kebutuhan percakapan. Pada data 5 penutur memberikan informasi bahwa dia adalah calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Panggilannya *Lik Djo*. Dia asli orang Sumber. Nama lengkap dia adalah Rahardjo, S.H., calon anggota DPRD Kota Surakarta dari daerah pemilihan Kota Surakarta 2. Dia memunyai sifat kritis, tegas, dan membela orang kecil. Penutur menyampaikan informasi tersebut untuk *meyakinkan* mitra tutur agar memberikan dukungan dengan memilihnya dalam pemilu.

Pada data 6 penutur juga memberikan kontribusi informasi yang memadai dan tidak berlewat. Penutur menyatakan bahwa hanya Indonesia Hebat-lah yang akan menjunjung dan menegakkan supremasi hukum di negeri ini (*Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar di mata hukum, itulah Indonesia Hebat*). Indonesia Hebat itu adalah PDI Perjuangan. Penutur juga menyatakan bahwa dirinya bernama Tjahjo Kumolo, S.H., calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Pernyataan itu berimplikasi *meyakinkan* mitra tutur bahwa dia layak untuk dipilih menjadi wakil rakyat.

Maksim kualitas merupakan maksim yang mewajibkan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang benar berdasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Pemenuhan maksim kualitas pada kampanye politik dalam kain rentang tecermin pada data tuturan berikut ini.

Data 7

Hei kawan, bangunlah dari tidurmu,
masih ada waktu untuk berbuat
BONGKAR KEBIASAAN KUNO...!
JANGAN JUAL SUARAMU
HANYA MENCIPTAKAN

KORUPTOR...!!!

6. GERINDRA
UNTUK DPRD II KABUPATEN
BANYUMAS
PARTAI GERINDRA COBLOS CALEG
NOMOR URUT 9
H. AGAM SOEDIJONO, SH
PILIH CALEG YANG MUDA,
BERANI, JUJUR, BERKWALITAS &
PROFESIONAL
Setelah Berkiprah di Perusahaan
Swasta Nasional dalam group PT. Astra
International Tbk, Kini Saatnya Berkarya
Memajukan Banyumas Lebih Baik

Data 8

Drs. H. AKHMAD MUQOWAN
UU DESA Gerbang Kesejahteraan
Masyarakat DESA
MARI KAWAL UU DESA
Dengan Memilih CALEG DPD No.4 Drs.
H. AKHMAD MUQOWAN
(KETUA PANSUS UU DESA)
NOMOR 4
CALEG DPD RI
DEWAN PERWAKILAN DAERAH RI
DAPIL JAWA TENGAH

Pada data 7 penutur menyatakan bahwa masih ada waktu untuk berbuat mengubah keadaan. Penutur juga menyatakan agar mitra tutur membongkar kebiasaan kuno, yaitu menjual suara karena hanya menciptakan koruptor. Pernyataan penutur dalam tuturan itu didasarkan pada pengalamannya serta didukung dengan bukti yang kuat bahwa ada kebiasaan masyarakat yang menjual suaranya saat pemilihan umum. Dia juga memiliki bukti yang kuat bahwa calon yang membeli suara itu akan berusaha mencari pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Upaya pengembalian itu dilakukan secara membabi buta dan menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara korupsi. Dengan bukti tersebut, tuturan yang disampaikan penutur sudah memenuhi maksim kualitas dan memuat implikatur *meyakinkan* mitra tutur.

Pada data 8 penutur menyatakan bahwa Undang-Undang Desa merupakan pintu gerbang memasuki kesejahteraan rakyat. Pernyataan itu bukan sekadar basa-basi. Penutur memiliki bukti kebenaran tuturannya karena dia adalah ketua Pansus Undang-Undang Desa. Dengan penyertaan bukti tersebut, pernyataan itu memenuhi maksim kualitas dan memunculkan implikatur *meyakinkan* mitra tutur untuk mendukung dirinya dalam pemilu legislatif.

Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah yang sedang dituturkan. Pemenuhan maksim relevansi akan menghasilkan tuturan yang kooperatif, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 9

Mohon Doa Restu & dukungan
Coblos No. Urut 4 PDI Perjuangan
SUNARTO, SE
Caleg DPRD Kabupaten Kudus Dapil 1
Jati Kota
4. SUNARTO, SE
BERJUANG UNTUK
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SIAP MENGABDI DAN MELAYANI
RAKYAT
TIDAK KORUPSI

Data 10

MOHON DOA RESTU &
DUKUNGANNYA
Partai Gerindra Lahir dari Rakyat
Berjuang untuk Rakyat, Bekerja untuk
Rakyat
6. GERINDRA
COBLOS 1
1. H. ABDUL WACHID
CALEG DPR RI DAPIL JATENG 2
(JEPARA, KUDUS, DEMAK)
NOMOR URUT 1

Pada data 9 penutur memberikan informasi yang relevan. Penutur memberikan informasi

yang sesuai dengan tuntutan masyarakat kepada para calon anggota legislatif, yaitu jujur, berpihak pada rakyat, mau melayani bukan dilayani, dan tidak korupsi. Tuntutan itu direspons oleh penutur dengan mengatakan bahwa dirinya sanggup berjuang untuk menyejahterakan rakyat, siap mengabdikan dan melayani rakyat, serta berjanji tidak akan melakukan korupsi. Pernyataan penutur tersebut relevan dengan keinginan rakyat. Tuturan tersebut berimplikasi *meyakinkan* mitra tutur bahwa dia layak dipilih karena dapat memenuhi keinginan atau tuntutan rakyat.

Pada data 10 penutur menyatakan bahwa Partai Gerindra lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Tuturan tersebut relevan dengan prinsip demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Tuturan itu berimplikasi *meyakinkan* mitra tutur bahwa Partai Gerindra adalah partai yang demokratis dan calon legislatif dari partai tersebut layak dipilih menjadi wakil rakyat.

Maksim cara mengharuskan penutur berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa, tidak berlebihan, dan runtut. Pada kampanye politik dalam kain rentang penutur berusaha memenuhi maksim ini untuk mengajak mitra tutur agar mendukung dirinya dan partai pengusungnya dalam pemilu, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 11

MOHON DO'A RESTU &
DUKUNGANNYA
4 PDI PERJUANGAN
SARINO
Caleg DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil II
(Kudus, Jepara, Demak)
SURAT SUARA PEMILU CALON
ANGGOTA LEGISLATIF DPR
PROVINSI JAWA TENGAH DAPIL II
(KUDUS, JEPARA, DEMAK)
4 PDI Perjuangan
6. SARINO
Kerja Nyata Bukan Hanya Janji

Asli & Pasti Peduli Kota Kudus

Data 12

SUWUN DUKUNGANE

‘Terima kasih dukunganya’

NOOR AZIZ

CALON DPRD KABUPATEN KUDUS

DAPIL 1 (KOTA-JATI)

PDI PERJUANGAN

SURAT SUARA PEMILI CALEG DPRD

KUDUS DAPIL 1 (KEC. KOTA-JATI)

PDI PERJUANGAN

5. NOOR AZIZ

Cari Gambar PDI Perjuangan Coblos
Caleg No. 5

Mantan Kepala Desa Janggalan (Dua
Periode)

Bersama Kita Sejahtera

Data 11 dan 12 merupakan contoh kampanye politik dalam kain rentang yang memenuhi maksim cara. Pada data 11 penutur menyatakan permintaannya secara langsung kepada mitra tutur agar mendoakan, memberi restu, dan mendukungnya dalam Pemilu. Kemudian, penutur menginformasikan identitasnya secara jelas, yaitu Sarino, calon DPR Provinsi Jawa Tengah Daerah Pilihan 2 (Kudus, Jepara, Demak) dari PDI Perjuangan. Selanjutnya, penutur memberikan urutan cara untuk mendukung dalam Pemilu. Pertama, buka dan lihat Surat Suara Pemilu Calon anggota legislatif DPR Provinsi Jawa Tengah Dapil 2 (Kudus, Jepara, Demak). Kedua, coblos gambar nomor 4 PDI Perjuangan. Ketiga, coblos nama caleg nomor urut 6 atas nama Sarino. Pada akhir tuturan penutur mengemukakan janjinya akan bekerja secara nyata dan tidak hanya janji karena dia orang asli Kudus dan pasti akan peduli terhadap Kota Kudus. Berdasarkan uraian tersebut, tuturan itu memuat implikatur *meminta dukungan* dan *menjanjikan* sesuatu jika terpilih menjadi anggota DPRD.

Pada data 12 penutur secara langsung menyampaikan permintaan dukungan kepada

mitra tutur. Dia secara jelas memperkenalkan namanya, yaitu Noor Aziz, calon DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan 1 (Kota-Jati) dari PDI Perjuangan. Selanjutnya, secara runtut dia menerangkan cara yang harus dilakukan oleh mitra tutur untuk mendukungnya, yaitu membuka Surat Suara Pemilu Calon Legislatif DPRD Kudus Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Kota-Jati), kemudian melihat kolom PDI Perjuangan dan cari calon legislatif nomor 5. Noor Aziz, dan coblos. Untuk lebih menjelaskan identitas dan reputasinya, penutur menambahkan informasi bahwa dia adalah mantan Kepala Desa Janggalan selama dua periode dan memiliki motto “Bersama Kita Sejahtera”. Dengan kelangsungan, kejelasan, dan keruntutan tuturan tersebut, dapat dikatakan bahwa tuturan itu memenuhi maksim cara dan memuat implikatur *meyakinkan* dan *meminta* mitra tutur untuk mendukung dan memilihnya menjadi Anggota DPRD Jawa Tengah.

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama

Suatu tuturan belum tentu menerapkan prinsip kerja sama dengan memenuhi maksim yang ditentukan. Penutur sering melanggar prinsip tersebut. Pelanggaran itu tidak berarti merusak atau mengacaukan tuturan, tetapi justru disengaja untuk menimbulkan implikasi dan efek tertentu. Pelanggaran prinsip kerja sama pada kampanye politik dalam kain rentang terjadi karena tidak terpenuhinya maksim kuantitas, kualitas, relevansi, maupun cara.

Pelanggaran maksim kuantitas pada kampanye politik dalam kain rentang dilakukan penutur dengan tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan. Ketidakpenuhan maksim kuantitas ini sengaja dilakukan oleh penutur untuk menimbulkan implikatur tertentu, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 13

Mohon Do’a Restu & Dukungannya
7 PARTAI DEMOKRAT

2 AGUS BUDIANTO SH

Data 14

PARTAI GERINDRA
 GERAKAN INDONESIA RAYA
 “Indahnya Hidup Jika Kita Bisa Berbagi”
 6 PARTAI GERAKAN INDONESIA
 RAYA
 9 Drs. Budi Harsono, MH
 Mohon Pilih Saya,
 “Untuk mewujudkan Peningkatan
 Pendapatan Rakyat Dengan Padat Karya”
 (9) Drs. Budi Harsono, MH
 Caleg Jawa Tengah II No. Urut 9 (Kudus,
 Jepara, Demak)
 BUDI HARSONO 08157554 1222

Kedua data tersebut merupakan tuturan yang melanggar prinsip kerja sama dengan tidak memenuhi maksim kuantitas. Pada data 13 penutur hanya memberikan informasi yang sangat minim. Ia hanya menyampaikan permintaan untuk mendukung partai dan dirinya tanpa memberikan informasi tentang jati dirinya secara memadai. Hal itu menjadikan mitra tutur bertanya siapa sebenarnya yang harus didukung. Namun, ada kemungkinan penutur sengaja memberikan informasi yang tidak lengkap agar mitra tutur merasa penasaran dan menganggap penutur tampil dengan segala kesahajaannya. Anggapan itu memunculkan implikatur *meyakinkan* mitra tutur bahwa penutur perlu dan pantas didukung atau dipilih.

Tidak seperti data 13 yang minim informasi, pada data 14 penutur justru memberikan informasi yang berlewah. Dalam tuturannya itu penutur mengulang-ulang nama partai dan nama dirinya. Kemudian, dia juga mengujarkan slogan “Indahnya hidup jika kita bisa berbagi”. Ungkapan tersebut sulit dipahami sehingga membingungkan mitra tuturnya. Ungkapan itu hanya dapat dipahami oleh peserta tutur yang mengetahui atau memahami konteksnya. Keberlewhan informasi tersebut menimbulkan anggapan bahwa penutur kurang percaya diri dan belum dikenal masyarakat.

Implikatur yang muncul dalam tuturan itu adalah *memperkenalkan diri* untuk *meyakinkan* mitra tutur bahwa penutur pantas didukung dalam pemilu legeslatif.

Pelanggaran prinsip kerja sama berikutnya adalah tidak memenuhi maksim kualitas. Ketidakpenuhan maksim kualitas pada kampanye politik dalam kain rentang dilakukan penutur dengan tidak memberikan kontribusi dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 15

SAATNYA MEMILIH DENGAN HATI
 INI PILIHANKU
 5 GOLONGAN KARYA
 Suara Golkar Suara Rakyat
 MOHON DO'A RESTU DAN
 DUKUNGANNYA

Data 16

Mohon Doa & Restu
 Insya Allah...
 BERSIH – AMANAH ANTI KORUPSI
 BERANI & MAMPU
 MEMPERJUANGKAN ASPIRASI
 RAKYAT
 8 PAN
 PARTAI AMANAT NASIONAL
 10 H. HADI SUTJIPTO, SH, MM
 DAPIL KOTA TEGAL – KAB TEGAL –
 KAB BREBES

Pada data 15 penutur melanggar prinsip percakapan dengan tidak memenuhi maksim kualitas. Penutur memberikan pernyataan *suara Golkar suara rakyat*. Pernyataan tersebut belum dapat diuji kebenarannya karena tidak didukung bukti yang memadai. Hal itu disengaja oleh penutur untuk meyakinkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang mewakili aspirasi rakyat. Implikatur yang timbul dari pelanggaran maksim ini adalah *meyakinkan* mitra tutur untuk memilih penutur.

Pada data 16 penutur memberikan pernyataan *bersih-amanah, antikorupsi, berani*

dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Pernyataan tersebut tidak cukup hanya dituturkan saja, tetapi perlu pembuktian. Padahal, ketika menyatakan komitmen itu penutur belum memiliki bukti yang memadai sebagai orang yang bersih, amanah, antikorupsi, dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, penutur dapat dikatakan melanggar prinsip percakapan dengan tidak memenuhi maksim kualitas. Berdasarkan hal itu, implikatur yang timbul adalah *meyakinkan* mitra tutur agar memilih dan mendukung penutur.

Pelanggaran prinsip kerja sama selanjutnya adalah tidak terpenuhinya maksim relevansi. Pelanggaran terhadap maksim relevansi terjadi ketika penutur tidak memberikan kontribusi yang relevan dengan topik pembicaraan. Pelanggaran terhadap maksim ini menimbulkan implikatur tertentu, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 17

PARTAI GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
GERINDRA MENANG PRABOWO
PRESIDEN
6 PARTAI GERAKAN INDONESIA
RAYA

Data 18

KERJA NYATA bersama PAN
8 PAN
PARTAI AMANAT NASIONAL
Rakyat Muak Korupsi
Rakyat Ingin Sejahtera
Rakyat Ingin Jalan, Irigasi, dan Jembatan
dibangun
INDONESIA KUAT

Pada data 17 tersebut penutur melanggar prinsip kerja sama dengan tidak memenuhi maksim relevansi. Pelanggaran itu berupa pernyataan *Gerindra menang Prabowo Presiden*. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan topik pembicaraan, yaitu pemilihan

calon anggota legislatif. Pernyataan *Gerindra menang* memang sudah sesuai dengan topik pembicaraan. Namun, pernyataan *Prabowo presiden* tidak berhubungan langsung dengan pemilu legislatif karena pemilihan presiden dilaksanakan sendiri dan tidak bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif. Pelanggaran maksim relevansi tersebut memuat implikatur *meminta* mitra tutur mendukung dirinya dan partai pengusungnya. Selain itu, penutur juga *menjanjikan* jika terpilih dan Partai Gerindra memenangi pilihan legislatif, ia memastikan mendukung Prabowo menjadi presiden. Pada sisi lain, jika mendukung penutur, mitra tutur juga mendukung Prabowo menjadi presiden.

Pada data 18 penutur melanggar maksim relevansi dengan memberikan kontribusi yang tidak relevan dengan topik pembicaraan, yaitu tuturan *rakyat muak korupsi; rakyat ingin sejahtera; rakyat ingin jalan, irigasi, dan jembatan dibangun*. Pernyataan tersebut tidak memiliki hubungan dengan topik pembicaraan, yaitu tentang pemilihan calon anggota legislatif. Pelanggaran maksim relevansi tersebut memuat implikatur *meminta dukungan* dengan *menjanjikan* untuk memberantas korupsi, menyejahterakan rakyat, dan membangun jalan, irigasi, dan jembatan jika terpilih.

Pelanggaran maksim cara dalam kampanye politik terjadi ketika penutur bertutur secara tidak langsung, kabur, taksa, berlebihan, dan tidak runtut. Pelanggaran maksim cara ini sengaja dilakukan penutur untuk memunculkan implikatur tertentu, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 19

Emoh Korupsi Emoh Ngapusi
'Tidak mau korupsi tidak mau menipu'
KUWE INDONESIA HEBAT
'Itu Indonesia Hebat'
4 PDI PERJUANGAN
INDONESIA HEBAT!
5 DAMAYANTI WISNU PUTRANTI

Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan
Jawa Tengah IX (Tegal, Brebes, Kota Tegal)

Data 20

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI...
KALAU BUKAN SEKARANG KAPAN
LAGI
6 GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
8. A. MUSTAQIN
ASLI WONG DEWEK
'asli orang sendiri'
KETUA DPC GERINDRA KAB.
BREBES
CALEG DPR-RI DAPIL 9 KAB. TEGAL-
KOTA TEGAL-KAB. BREBES

Pada data 19 dan 20 penutur melanggar prinsip kerja sama dengan tidak memenuhi maksim cara. Penutur tidak secara langsung, jelas, dan runtut menyatakan maksudnya meminta dukungan. Penutur hanya memperkenalkan jati dirinya serta partai pengusungnya saja. Ketidaklangsungan, ketidakjelasan, dan ketidakruntutan tuturan itu memuat implikatur *meyakinkan* mitra tutur untuk mendukung dan memilih dirinya serta partai pengusungnya dalam pemilu.

Penerapan Prinsip Kesantunan

Penerapan prinsip kesantunan dalam kampanye politik pada kain rentang hanya maksim ketimbangrasaan yang dipenuhi. Pemenuhan maksim ketimbangrasaan ini menuntut penutur memberikan biaya seringan-ringannya dan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada mitra tutur. Maksim ketimbangrasaan ini lazim diungkapkan dengan tuturan impositif (direktif) dan tuturan komisif, seperti contoh berikut ini.

Data 21

Mohon Doa Restu
PKB
Muda & Sederhana
Insya Allah AMANAT, NGRUMAT, TUR
MERAKYAT

3. KASTOMO, S.Pd.
CALEG DPRD KAB. PATI DAPIL IV
(KEC. WINONG. JAKEN.
PUCAKWANGI. JAKENAN)

Tuturan pada data 21 menunjukkan pemenuhan maksim ketimbangrasaan oleh penutur. Dia menggunakan tindak tutur impositif dan komisif untuk menyatakan maksudnya. Ia memilih tuturan impositif *mohon doa restu* dan tuturan komisif *insya allah amanat, ngrumat, tur merakyat* untuk memberikan biaya yang seringan-ringannya kepada mitra tutur meskipun memerlukan biaya yang tinggi bagi dirinya.

Pelanggaran Prinsip Kesantunan

Sumber implikatur berupa pelanggaran prinsip kesantunan pada tuturan kampanye politik pada kain rentang berbentuk pelanggaran maksim ketimbangrasaan, kemurahhatian, dan kerendahhatian. Pelanggaran maksim ketimbangrasaan terjadi karena penutur tidak meminimalkan biaya kepada mitra tuturnya. Hal itu tampak pada contoh berikut ini.

Data 22

2 PKB
NYALAKAN TEKATMU MENJADI
WARGA
PKB
3.HM. ROHAIDI
CALEG DPRD KOTA SEMARANG
DAPIL 4 TEMBALANG-CANDISARI

Pada data 22 penutur menyampaikan tuturan *Nyalakan tekadmu menjadi warga PKB*. Tuturan tersebut melanggar maksim ketimbangrasaan karena membebani biaya kepada mitra tuturnya dan memaksimalkan keuntungan untuk diri sendiri. Meminta mitra tutur untuk melakukan sesuatu yang dimaksudkan membuat penutur seakan-akan memunyai kedudukan yang lebih tinggi. Bagi mitra tutur, hal itu memerlukan biaya

sosial yang tinggi dari segi ketidakenakan. Pelanggaran maksim ketimbangrasaan tersebut menimbulkan implikatur *memerintah*.

Pelanggaran maksim kemurahhatian dalam kampanye politik terjadi karena penutur tidak meminimalkan keuntungan untuk diri sendiri dan juga tidak memaksimalkan keuntungan kepada mitra tutur. Yang dilakukan penutur justru memaksimalkan keuntungan untuk diri sendiri, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 23

MOHON DOA & DUKUNGANNYA
 AGAR KAMI BISA MELANJUTKAN
 PENGABDIAN & MELAYANI
 MASYARAKAT
 SURAT SUARA PEMILIHAN
 UMUM 2014 ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DPRD
 PROVINSI JAWA TENGAH
 7 PARTAI DEMOKRAT
 3 JOKO HARIYONO, SE., Msi
 CALON ANGGOTA DPRD PROV.
 JATENG DAIL IX (KAB. BREBES,
 KAB. & KOTA TEGAL)
 “BUKAN MAKSUD KAMI
 MENGEKSPLOITASI PASIEN-PASIEN
 YANG KAMI BANTU, TAPI KAMI
 HANYA BERMAKSUD SALING
 MEMBERIKAN INFORMASI SERTA
 MENGAJAK BERSAMA UNTUK
 SALING PEDULI, DAN BERBAGAI
 BUKTI PENGABDIAN KAMI TELAH
 BERUSAHA BERBUAT UNTUK
 MEMBANTU DAN MERINGANKAN
 SESAMA”

Tuturan penutur “*Bukan maksud kami mengeksploitasi pasien-pasien yang kami bantu, tapi kami hanya bermaksud saling memberikan informasi serta mengajak bersama untuk saling peduli, dan berbagai bukti pengabdian kami telah berusaha berbuat untuk membantu dan meringankan sesama*” melanggar maksim kemurahhatian karena memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Pada tuturan

tersebut penutur tampak lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan mitra tuturnya. Pelanggaran maksim tersebut menimbulkan implikatur *meyakinkan* mitra tutur.

Pelanggaran maksim kerendahhatian pada kampanye politik terjadi karena penutur meminimalkan penjelekan dan memaksimalkan pujian untuk diri sendiri, seperti pada tuturan berikut ini.

Data 24

3.PKS

*Nderek Nepangaken...ugi Nyuwun
 Dukungan Panjenengan*

‘Ikut memperkenalkan... juga minta dukungan Anda’

CALEG DPR RI JATENG 1

(KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG, KAB. SEMARANG, KAB. KENDAL)

PEMILU APRIL 2014

COBLOS 5. HADI PUTRATNO, SE, MM
 Tegas, Jujur dan Dapat Dipercaya

Pada data 24 penutur memaksimalkan pujian pada dirinya sendiri melalui tuturan *tegas, jujur, dan dapat dipercaya*. Pemaksimalan pujian untuk diri sendiri pada tuturan itu melanggar maksim kerendahhatian. Pelanggaran maksim itu menimbulkan implikatur *meyakinkan* mitra tutur.

SIMPULAN

Kampanye politik dalam kain rentang merupakan bentuk pemanfaatan bahasa dengan tujuan mempengaruhi atau memersuasi mitra tutur. Pada kampanye tersebut terdapat tuturan yang mengandung implikatur konvensional dan konversasional. Implikatur konvensional adalah implikatur yang diperoleh dari makna kata, bukan dari pelanggaran prinsip percakapan, sedangkan implikatur konversasional adalah implikatur yang diperoleh dari fungsi pragmatis yang tersirat dalam suatu percakapan.

Implikatur yang timbul dalam tuturan kampanye politik pada kain rentang adalah *meyakinkan, mengajak, meminta, menjanjikan* dan *memerintah*. Implikatur tersebut bersumber pada penerapan prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan dalam percakapan. Penerapan prinsip kerja sama meliputi pemenuhan dan pelanggaran maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Kemudian, penerapan prinsip kesantunan yang menimbulkan implikatur meliputi pemenuhan maksim ketimbang-rasaan serta pelanggaran maksim ketimbangrasaan, kemurahhatian, dan kerendahhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cummings, L. (2007). *Pragmatik*. Terjemahan Abdul Syukur Ibrahim. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cruse, D.A. (2000). *Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics*, hlm. 16. Oxford: Oxford University Press.
- Gazdar, G. (1979). *Pragmatic: Implicatur, Presupposition, and Logical Form*, hlm.38. New York: Academic Press.
- Grice, H.P. (1957). "Meaning". *The Philosophical Review*, volume 67. Durham: Duke University Press. hlm. 385.
- Grice, H.P. (1975). Logic and Conversation. dalam Cole, Peter dan J. Morgan (Eds.). *Pragmatic: A Reader*, hlm. 43, 45—47, 308. Oxford: Oxford University Press.
- Gunarwan, A. (2007). *Pragmatik: Teori dan Kajian Nusantara*, hlm. 247. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Handono, S. dkk. (2013). *Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Kampanye Politik*, hlm. 28. Semarang: Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Leech, G. (1983). *Principles of Pragmatic*, hlm. 132. London: Longman.
- Levinson, S.C. (1991). *Pragmatics*, hlm. 117. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lyons, J. (1995). *Linguistics Semantics an Introduction*, hlm.272. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nababan, PWJ. (1987). *Ilmu Pragmatik (Teori dan Penerapannya)*, hlm. 31. Jakarta: Depdikbud.
- Nadar, F.X. (2013). *Pragmatik dan Penelitian Pragmatik*, hlm. 60. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rohmadi, M. (2004). *Pragmatik Teori dan Analisis*, hlm. 272. Yogyakarta: Penerbit Lingkar Media Jogja.
- Rustono. (1999). *Pokok-Pokok Pragmatik*, hlm. 89—96. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*, hlm. 6, 15, 203, 241. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 31. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyaningtyas, T. (2009). "Bahasa Indonesia dalam Wacana Propaganda Politik Kampanye Pemilu 2009 Satu Kajian Sosiopragmatik". *Sosioteknologi*, Vol. 8, No. 17, Agustus 2009. hlm. 637—645. <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1026>.
- Wijana, D.P. dan Rochmadi. (2009). *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*, hlm. 4. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Zakiah, N. (2015). "Implikatur dalam Wacana Kampanye Politik Pilkada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Lampung Periode 2014—2019 (Tinjauan Pragmatik)". *TAPIS*. Vol. 11. No. 1. Januari—Juni 2015. hlm. 20—33. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/839>.